KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Presiden gopac dorong peran parlemen untuk pembangunan inklusif
Tanggal : Kamis, 06 Oktober 2016
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 3

PRESIDEN GOPAC DORONG PERAN PARLEMEN UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF

Tiga peran parlemen dalam mencegah dan melawan korupsi: legislasi, pengendalian anggaran, dan pengawasan.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menjadi pembicara pada Forum MENA-OECD di Tunisia

Wakil Ketua DPR RI, yang juga Presiden Global Organisation of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), Fadli Zon menjadi pembicara dalam program Middle East and North Africa (MENA) pada Konferensi The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) di Tunisia, 3-4 Oktober 2016, waktu setempat.

Di depan para menteri negara-negara MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara), Fadli menyampaikan pandangannya tentang pentingnya peran parlemen mendorong pembangunan yang inklusif. Sebagai problem global, dia menyatakan pembangunan yang inklusif harus berdiri pada dua prinsip, yakni "*equality of opportunity*" dan "*participation in growth by all*".

"Pembangunan yang inklusif menjadikan rakyat sebagai fokus semua kebijakan pemerintah," kata politikus F-Gerindra itu.

Sebagai Presiden GOPAC, Fadli juga menyatakan salah satu hambatan terbesar mewujudkan pembangunan yang inklusif adalah masih tingginya tingkat korupsi. Korupsi menjadikan pemerintah lemah mengeksekusi program dan kebijakan pembangunan kepada rakyatnya.

"Korupsi telah membuat program pembangunan tidak tepat sasaran dan menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat. Selain itu, korupsi mendorong rendahnya inovasi sebuah negara mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya," imbuhnya.

Fadli menekankan, parlemen di seluruh dunia setidaknya memiliki tiga peran dalam mencegah dan melawan korupsi, yakni melalui peran legislasi, peran kontrol anggaran, dan peran pengawasan. Optimalisasi ketiga peran ini sangat vital bagi parlemen melawan korupsi.

Selain itu, dia mengutarakan membangun kerja sama global antarparlemen—*interparliamentary network*—penting agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara global dan sistematis. Dalam konteks ini, GOPAC dapat menjadi platform bersama bagi semua anggota parlemen dunia dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Tanpa diiringi upaya pemberantasan korupsi yang masif dari semua pihak, semua negara sulit mewujudkan pembangunan yang inklusif," tegas politikus asal dapil Jawa Barat itu.

Konferensi MENA-OECD merupakan konferensi yang bertujuan untuk berbagi pandangan dan strategi dari para pemangku kebijakan, masyarakat, serta perwakilan organisasi internasional dalam mendorong pembangunan yang inklusif, terutama negara-negara di kawasan MENA.

Konferensi ini dihadiri para pemangku kebijakan negara-negara MENA antara lain Presiden Tunisia H.E. Beji Caid Essebsi, Perdana Menteri Tunisia Youssef Chahed, Menteri Pembangunan Tunisia Fadhel Abdelkefi, dan Menteri Luar Negeri Tunisia Khemaies Jhinaoui. Turut hadir Sekretaris Jenderal OECD Jose Angel Gurria, Sekjen Serikat Pekerja Umum dan penerima penghargaan Nobel Perdamaian 2015 Tunisia Houcine Abassi, serta perwakilan sejumlah kementerian dari Maroko, Palestina, Mesir, Turki, Portugal, dan Prancis.